

PERLINDUNGAN ANAK

2026

PERDA KAB BARUT NO. 4, BD NO. 4, HLM. 1-31

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARITO UTARA TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DAN ANTAR WAKTU

- Abstrak :
- Untuk memberikan hak setiap warga negara atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar dan berkembang secara wajar dan mendapatkan rasa aman yang konsisten dan sistematis, bahwa pemerintah daerah, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan lainnya mempunyai tanggung jawab dalam pelaksanaannya dan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perlindungan anak di Kabupaten Barito Utaramaka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan anak.
 - Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 1 Tahun 1974; UU No. 4 Tahun 1979; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 23 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 17 Tahun 2023; PP No. 54 Tahun 2007, PP No. 44 Tahun 2017, PP No. 78 Tahun 2021, Permensos No. 110/HUK/2009 Tahun 2009; Permensos No. 1 Tahun 2020; KemenPPPA No. 12 Tahun 2022; KemenPPPA No. 1 Tahun 2022, KemenPPPA No. 3 Tahun 2023; Perda Kab. Barito Utara No. 3 Tahun 2020.
 - Hak dan kebutuhan dasar anak yang harus di penuhi yaitu hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, memperoleh Pendidikan, Kesehatan, identitas, pengasuhan serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Adalah kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah, keluarga, orang tua, masyarakat, dunia usaha dan pihak terkait dalam mewujudkan perlindungan anak. Penyelenggaraan perlindungan anak termasuk upaya pencegahan, pelayanan, pendampingan, penanganan dan pemulihan bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Perlindungan khusus bagi anak antara lain anak korban kekerasan, penelantaran, eksploitasi, perdagangan anak, anak berhadapan dengan hukum, anak penyandang disabilitas, anak dalam situasi darurat, serta anak dengan kondisi khusus lainnya. Peran keluarga dan masyarakat termasuk pengasuhan pemenuhan kebutuhan anak, pencegahan kekerasan serta keterlibatan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak. Peran serta masyarakat termasuk melalui forum atau organisasi yang bergerak dalam bidang perlindungan anak.
- Catatan :
- Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 13 Maret 2026.
 - Nomor registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah; 04, 13/2026